

NIK Jokowi di Website KPU Sudah Di-takedown

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menyatakan, lembaganya sudah menurunkan tampilan (take-down) nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) di laman resmi milik KPU RI. Hal itu menyusul hebohnya data Kepala Negara yang bocor di jagat media sosial (medsos).

"Itu sudah kita takedown, sudah kita turunkan," kata Ilham di depan ruang rapat komisi II DPR, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/9).

Ilham menjelaskan kembali, saat itu KPU telah meminta persetujuan kepada masing-masing calon presiden untuk mempublikasikan data pribadinya.

Menurut Ilham, hal itu penting dalam rangka mengentalkan calon yang berlaga di Pilpres 2019 kepada ma-

sarakat luas.

"Nah jadi penulisan itu sudah persetujuan dari calon. Ketika itu Pak Jokowi dan Pak Prabowo," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar bebas di media sosial. Bahkan ada yang menggunakan NIK tersebut untuk mengakses aplikasi PeduliLindungi.

Sehingga tampak informasi surat keterangan vaksinasi covid-19 milik Presiden Jokowi. Mengingat saat ini dengan mudah menemukan NIK Presiden Jokowi.

Salah satunya bisa didapat dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019 <https://infopemilu2.kpu.go.id/pilpres/calon/jokowi>. ■ han

KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar 21 Februari, Ini Pertimbangannya

JAKARTA (IM) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki sejumlah pertimbangan ketika mengusulkan waktu pelaksanaan Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024.

Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR, Ketua KPU RI Ilham Saputra menyampaikan, sebelumnya KPU telah mengusulkan jadwal pelaksanaan Pemilu digelar pada 28 Februari 2024. Namun, seiring perjalanannya, KPU menilai perlu ada perubahan tanggal menjadi 21 Februari.

"Kenapa kami mengusulkan tanggal pemilu nasional kita diselenggarakan pada 21 Februari 2024, tentu dengan pertimbangan memberikan waktu memadai untuk penyelesaian secepatnya hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan kepala daerah," kata Ilham dalam paparannya, Senin (6/9).

Ilham mengatakan, hal ini merupakan kali pertama pemilu dan pilkada dilaksanakan di tahun yang sama. Sehingga, KPU perlu mempertimbangkan bagaimana nanti partai politik harus mempunyai kursi atau suara yang disyaratkan dalam pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ilham menyebut ada pertimbangan lain atas perubahan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. Pertimbangan tersebut di antaranya; memperhatikan beban kerja badan adhoc pada tahapan pemilu yang berisikan dengan tahapan pemilihan kepala daerah. Selain itu, KPU telah mempertimbangkan hari pemungutan suara tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan.

"Kami sudah hitung ramadan di bulan April, kemudian rekap perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri," ujarnya. ■ mei

FOTO: ANI



RAKER KOMISI III DPR DENGAN MENKUMHAM

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9). Rapat tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters antara Indonesia dan Federasi Rusia.

KPK Periksa Pejabat Pemkab Bintang Terkait Korupsi Pengaturan Barang Cukai

JAKARTA (IM) - Kasi Pengendalian Barang Pokok dan Barang Penting, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Bintang, Setia Kurniawan, diperiksa tim penyidik KPK, Senin (6/9).

Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Bintang tahun 2016 - 2018.

Apri Sujadi ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Bintang tahun 2016 - 2018.

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polres Tanjung Pinang alamat Jalan A. Yani, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (6/9).

Selain Setia Kurniawan, penyidik juga memanggil empat saksi lainnya yakni Direktur PT Berlian Inti Sukses, AM; dua Direktur CV Three Star Bintang, Bobby Susanto dan Agus; serta pihak swasta, Budiarto. Keterangan para saksi juga sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Apri Sujadi (AS).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintang, Apri

Sujadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBB) Bintang tahun 2016 - 2018.

Perbuatan keduanya telah merugikan negara sekitar Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsinya dengan Apri tersebut.

Perbuatan keduanya telah merugikan negara sekitar Rp250 miliar. Oleh karenanya, KPK menyatakan Apri dan Mohd Saleh melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsinya dengan Apri tersebut.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif Bintang, Apri

2 Polhukam

IDN/ANTARA



Pasukan Raider Lakukan Serangan Kilat, Teroris KKB Papua Berhamburan ke Jurang

Tim Dalpur berhasil mengamankan satu pucuk pistol P1 milik KKB dan beberapa perlengkapan perang lainnya saat melakukan pembersihan pada Sabtu (4/9) pagi.

JAKARTA (IM) - Pasukan Satgas Yonif Para Raider 501/BY melakukan serangan kilat ke markas teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Hal ini membuat anggota KKB berhamburan ke jurang.

Satgas Yonif Para Raider 501/BY menyita satu pucuk senjata jenis pistol P1 saat serangan mendadak di Kampung Bugapa Distrik Supaga Kabupaten Intan Jaya Papua, Sabtu (4/9).

Dansatgas Yonif Para Raider 501/BY Letkol Inf Arfa Yudha Prasetya mengatakan, Tim Dalpur yang terlibat dalam operasi di Kam-

pung Bugapa Distrik Supaga dipimpin langsung oleh Lettu Inf Yulian Nugroho.

Operasi ini, kata dia merupakan tindak lanjut kegiatan dari Operasi Bajra 10 yang digelar untuk mencari dan meneyekat pergerakan kelompok KKB yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

"Tim Dalpur berhasil mengamankan satu pucuk pistol P1 milik KKB dan beberapa barang bukti perlengkapan perang lainnya dalam pembersihan yang dilaksanakan pada Sabtu pagi," ujar Arfa dalam keterangan tertulis dikutip Senin (6/9).

Dijelaskan Arfa, kronologi perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah Honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana.

Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan.

Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat Honai anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar Honai.

"Setelah melaksanakan pembersihan di dalam Honai dan berhasil mengamankan 1 Pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal," ujarnya.

"Ini merupakan keberhasilan dari Tim yang diawaki prajurit Bajra Yudha yang

terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teroris kelompok separatis teroris Papua," tandasnya. ■ han

perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah Honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana.

Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan.

Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat Honai anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar Honai.

"Setelah melaksanakan pembersihan di dalam Honai dan berhasil mengamankan 1 Pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal," ujarnya.

"Ini merupakan keberhasilan dari Tim yang diawaki prajurit Bajra Yudha yang

terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teroris kelompok separatis teroris Papua," tandasnya. ■ han

perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah Honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana.

Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan.

Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat Honai anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar Honai.

"Setelah melaksanakan pembersihan di dalam Honai dan berhasil mengamankan 1 Pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal," ujarnya.

"Ini merupakan keberhasilan dari Tim yang diawaki prajurit Bajra Yudha yang

terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teroris kelompok separatis teroris Papua," tandasnya. ■ han

perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah Honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana.

Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan.

Saat terlihat sekelompok orang KKB lari berhamburan ke jurang dekat Honai anggota tim langsung melaksanakan pengamanan di sekitar Honai.

"Setelah melaksanakan pembersihan di dalam Honai dan berhasil mengamankan 1 Pucuk pistol P1 dan perlengkapan perang tradisional lainnya milik KKB yang tertinggal," ujarnya.

"Ini merupakan keberhasilan dari Tim yang diawaki prajurit Bajra Yudha yang

terpilih dalam memberikan rasa aman bagi warga dari aksi teroris kelompok separatis teroris Papua," tandasnya. ■ han

perburuan KKB yang terjadi di Kampung Bugapa merupakan buah dari kesabaran dalam memperhatikan situasi dan kondisi wilayah melalui patroli dan taktik operasi. Adapun sasaran dicurigai yaitu sebuah Honai yang terdapat beberapa orang diduga kelompok KKB berada di sana.

Setelah itu, anggota tim Dalpur segera mengatur posisi sesuai dengan perhitungan keadaan di lapangan.

RDP PEMBAHASAN PEMILU 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan (tengah) bersama Anggota Bawaslu Mochammad Affuddin (kanan) dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9). Rapat tersebut membahas persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Masyarakat Dinilai Masih Abai Prokes, Epidemiolog Usulkan PPKM Diperpanjang

JAKARTA (IM) - Masyarakat Indonesia dinilai masih banyak yang abai terhadap protokol kesehatan (prokes) seperti berkerumun. Sebab itu, Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengusulkan ke pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, dan 2.

"Kalau kita lihat banyak masyarakat yang beraktivitas dengan mengabaikan protokol kesehatan untuk kegiatan nonesensial seperti kerumunan anak muda nongkrong - seperti yang terjadi di Holy Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Dicky pun berharap pemerintah lebih cermat melihat sejumlah daerah yang angka vaksinasi Covid-19 masih rendah, kapasitas ICU Rumah Sakit di atas 50%, dan angka kematian yang cukup tinggi sebagai indikator menerapkan PPKM Level 4. "Jika terus abai, Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Dicky pun berharap pemerintah lebih cermat melihat sejumlah daerah yang angka vaksinasi Covid-19 masih rendah, kapasitas ICU Rumah Sakit di atas 50%, dan angka kematian yang cukup tinggi sebagai indikator menerapkan PPKM Level 4. "Jika terus abai, Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Dicky pun berharap pemerintah lebih cermat melihat sejumlah daerah yang angka vaksinasi Covid-19 masih rendah, kapasitas ICU Rumah Sakit di atas 50%, dan angka kematian yang cukup tinggi sebagai indikator menerapkan PPKM Level 4. "Jika terus abai, Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Dicky pun berharap pemerintah lebih cermat melihat sejumlah daerah yang angka vaksinasi Covid-19 masih rendah, kapasitas ICU Rumah Sakit di atas 50%, dan angka kematian yang cukup tinggi sebagai indikator menerapkan PPKM Level 4. "Jika terus abai, Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Dicky pun berharap pemerintah lebih cermat melihat sejumlah daerah yang angka vaksinasi Covid-19 masih rendah, kapasitas ICU Rumah Sakit di atas 50%, dan angka kematian yang cukup tinggi sebagai indikator menerapkan PPKM Level 4. "Jika terus abai, Wings Kemang Jakarta Selatan- serta aktivitas wisata yang mengabaikan prokes, sebaiknya PPKM diperpanjang dan aturannya diperketat," ujar Dicky Budiman, kepada wartawan, Senin (6/9).

Ia mengatakan masih banyak warga abai terhadap penerapan prokes seperti memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas. Ia mengkhawatirkan hal ini dapat berpengaruh

terhadap kenaikan angka kasus Covid-19. "Kalau melihat masyarakat masih abai pada prokes tentunya kemungkinan untuk kenaikan angka kasus Covid-19 naik dapat terjadi. Apalagi testing Covid-19 di Indonesia masih jauh dari angka ideal satu juta test setiap hari," tuturnya.

Kubu Tommy Soeharto Berharap Menkumham Sahkan Susunan Pengurus Partai Berkarya

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama yang membatalkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) terkait kepemimpinan Muchdi Purwopranjono atau Muchdi Pr.

Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diajukan oleh kubu Ketua Umum Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Dalam putusannya, majelis hakim membatalkan pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta susunan pengurus Partai Berkarya periode 2020-2025.

"Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 182/G/2020. PTUN. JKT. Tanggal 16 Februari 2021 yang dimohonkan banding tersebut," demikian bunyi putusan majelis hakim yang diaksesi melalui laman PTTUN Jakarta, yang dikutip pada Senin (6/9).

Majelis hakim yang memutus permohonan banding tersebut diketuai Sulisty, beranggotakan Santer Sitorus dan Eddy Nurjono. Putusan ini ditetapkan pada Rabu (1/9).

Saat dihubungi, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan akan mengirim surat kepada Menkumham Yasonna Laoly. "Setelah mendapatkan salinan putusan PTTUN, kami akan segera berkonsultasi dengan Menkumham dan mengirimkan surat permohonan kepada pak Menteri," kata Priyo, Senin (6/9).

Ia berharap Yasonna segera mengesahkan kepemimpinan partai di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto. Priyo meyakini Yasonna akan menindaklanjuti putusan itu dengan pengesahan.

"Atas nama keadilan, kebenaran dan penghormatan atas hukum, Pak Menteri Yasonna Laoly akan mengesahkan kembali SK 04 dan 07 Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Hutomo Mandala Putra, Priyo Budi Santoso, Neneng Tuty," ucapnya.

Sebelumnya, pada 16 Februari 2021, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Tommy atas putusan Menkumham yang mengesahkan kepemimpinan DPP Partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muchdi. SK

Menkumham Nomor M HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Berkarya, tanggal 30 Juli 2020, dinyatakan batal oleh majelis hakim.

Kemudian, kubu Muchdi Pr mengajukan banding. Namun, majelis hakim PTTUN memperkuat putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Tommy. Melalui gugatan itu, Tommy meminta Kemkumham mencabut pengesahan DPP partai Berkarya di bawah kepemimpinan Muchdi Pr.

Dualisme kepemimpinan Partai Berkarya bermula ketika sejumlah kader menilai kepemimpinan Tommy Soeharto tidak berjalan dengan baik. Pada Maret 2020, sejumlah kader Partai Berkarya membentuk Presidium Penyelamat Partai untuk meminta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dipercepat.

Meski sejumlah pengurus partai kemudian diberhentikan, Presidium Penyelamat Partai tetap menggelar Munaslub pada Juli 2020. Dari Munaslub itu, Muchdi Purwopranjono terpilih sebagai ketua umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai sekretaris jenderal.

Hasil Munaslub kubu Muchdi pun diserahkan ke Kemenkumham dan disahkan lewat SK yang diterbitkan kementerian tersebut.

Hal itu membuat kubu Tommy tersingkir dan berujung pada gugatan ke PTUN Jakarta. ■ han

UNDANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. MANOOR BULATN LESTARI

Direksi PT. Manoora Bulatn Lestari, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur ("Perseroan") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 15.00 WITA
Tempat : Business Center, Unit A1, Jalan Sendawar Raya, Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
3. Persetujuan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan penguasaan dan pengawasannya selama Tahun Buku 2020;
4. Persetujuan untuk menerima laporan laba/rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor eksternal untuk Tahun Buku 2021;
6. Laporan tentang perkembangan proyek/kegiatan dan rencana Perseroan; dan
7. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.

Catatan:
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal undangan ini sampai dengan tanggal Rapat.

Kabupaten Kutai Barat, 7 September 2021
PT. MANOOR BULATN LESTARI
Direksi

PENGUMUMAN

Dengan ini diumumkan kepada para Kreditur dan para Debitor perseroan bahwa "PT. PROVIDEN MITRATARA", berkedudukan di Jakarta Barat, telah dibubarkan terhitung mulai tanggal 09 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pembubaran "PT. TEMPINDO BINAJASA" tanggal 25 Agustus 2021 nomor 03 yang dibuat oleh BUDIMAN CORNELIUS SANTIAGO HUTAPEA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan kepada para Kreditur dan Para Debitor perseroan dipisahkan untuk menghubungi:

Team Likuidatur:
Tn. TONY RAHARDJA
Alamat : Gedung Alfamart Lt. 4
Jl. Gunung Sahari VII A No. 11
No. Tlp : 021 6250388 / 08778164-4500
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Demikian disampaikan.
Team Likuidatur

PENGUMUMAN

Direksi PT. SUKSES DINAMIKA LESTARI, berkedudukan di Kabupaten Tangerang ("Perseroan"), mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 06 September 2021, no 07, yang dibuat dihadapan JOKO HANGGONO, S.H., M.M., M.Kn., M.Hum., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan menaikan modal dasar Perseroan dari Rp.11.000.000.000,- (sebelas miliar Rupiah), menjadi sebesar Rp.507.500.000.000,- (limaratus tujuh juta limaratus ribu Rupiah); serta modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan sebesar Rp.10.010.000.000,- (sepuluh miliar sepuluh juta Rupiah), menjadi sebesar Rp.507.500.000.000,- (limaratus tujuh juta limaratus ribu Rupiah).

Keberatan dan/atau sanggahan atas keputusan penuruman modal tersebut, dapat disampaikan ke Perseroan dengan alamat Komplek Ruko Villa Permata C 1 No 12, Lippo Karawaci, Kec. Bencocoran, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Prop. Banten - 15810, dan ditembuskan kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Sub Direktorat Badan Hukum-Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. HR Rasuna Said Kavling 6-7, Jakarta Selatan, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini, guna memenuhi ketentuan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tangerang, 06 September 2021
Direksi
PT. SUKSES DINAMIKA LESTARI